

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) menjadi bagian terpenting dalam penyelenggaraan demokrasi pada negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia. Pemilu sering diartikan sebagai perwujudan pesta demokrasi bagi rakyat, dimana adanya proses para pemilih (masyarakat) untuk memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan ini beraneka-ragam, mulai dari presiden beserta wakil presiden, wakil rakyat di parlemen/ditingkat pemerintahan pusat maupun daerah, seperti DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Awalnya, pemilu di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten saja. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada 2002, tepatnya di tahun 2004 dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden beserta wakil presiden yang pertama kali dilakukan langsung oleh rakyat.

Pemilu langsung oleh rakyat merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945). Perwujudan kedaulatan rakyat ini dengan pelaksanaan pemilu secara langsung untuk

memilih wakil-wakil rakyat sebagai penyalur dari aspirasi rakyat itu sendiri. Pelaksanaan dari pemilu tersebut dengan memakai asas langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang menyatakan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian pemilihan umum tersebut memberi rakyat Indonesia kebebasan dalam memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.

Pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti juga dengan penyelenggaraan pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) secara langsung. Pemilihan langsung oleh rakyat setempat di daerah menunjukkan betapa dihargainya hak politik semua warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia menjamin seluruh masyarakatnya untuk berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Aktualisasi dari masyarakat dalam berkumpul serta berpendapat ini mewujudkan hak-hak politik warga negara seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) dijadikan juga bagian dalam pemilu.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang masuk dalam peringkat lima besar di dunia. Masyarakat dengan jumlah penduduk yang banyak ini juga terdiri dari berbagai suku, agama, maupun budaya. Adanya jumlah penduduk yang banyak dan bersifat plural ini mengharuskan adanya perwakilan di setiap daerah. Perwakilan rakyat pun harus memiliki kualitas yang memadai dan berkompeten dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Kehidupan manusia di dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara.

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia sebagai warga negara hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak bersimbol. Proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi, sedangkan secara langsung, hal ini berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah dan institusi-institusi di luar pemerintah telah menghasilkan serta membentuk variasi pendapat, pandangan, dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Perilaku politik merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan yang terkait dengan keputusan politik baik proses pembuatannya

maupun pelaksanaannya. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya untuk melakukan perilaku politik, seperti melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin, mengikuti suatu partai politik, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas, dan lain sebagainya.

Perilaku politik berkaitan dengan budaya politik. Istilah budaya politik mulai dikenal sejak aliran perilaku (*behaviorism*) muncul. Istilah ini tidak jelas konsepnya karena penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik. Istilah budaya politik sering digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Menjelaskan dengan pendekatan budaya politik merupakan upaya yang lebih dalam melihat perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.

Perilaku politik dalam sebuah kelompok lebih ditekankan melalui pendekatan perilaku pemilih, yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis melihat masyarakat sebagai satu kelompok yang bersifat *vertical* dari tingkat yang terbawah hingga teratas. Tingkatan atau kelompok yang berbeda inilah akan membentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan sikap politik dari masing-masing individu. Model sosiologis mengasumsikan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial dan pengelompokan sosial pemilih serta karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih. Pemilih memiliki orientasi tertentu terkait karakteristik dan pengelompokan sosialnya tersebut dengan pilihan partai atau

calon tertentu. Masyarakat sebagai pemilih mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan calon pemimpin yang mereka inginkan. Kriteria yang dimiliki oleh masyarakat itu berasal dari pemikiran rasional yang berasal dari pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.

Penjelasan singkat tersebut menunjukkan perilaku politik dalam suatu pemilihan langsung oleh rakyat berkaitan erat dengan budaya politik yang akan menimbulkan suatu orientasi tertentu. Perilaku politik dari masyarakat ini lebih dikenal dengan perilaku pemilih. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya. Budaya politik juga sebagai sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem atau dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Warga negara pun senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Melalui orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Orientasi yang melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individu. Berbagai cara yang sistematis untuk mengetahui

orientasi individual terhadap obyek-obyek politik tersebut dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Ketiga orientasi ini merupakan suatu komponen yang saling berkaitan.

Orientasi kognitif merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman politik seseorang terkait sistem politik. Orientasi afektif merujuk pada perasaan seseorang terhadap sistem politik. Orientasi evaluatif merujuk pada proses penilaian seseorang terhadap berbagai gejala politik dari sistem politik yang ada. Penggunaan ketiga aspek orientasi tersebut dikaitkan satu sama lain sehingga membentuk beberapa pendekatan yang dapat dijadikan indikator. Pendekatan tersebut secara tidak langsung akan membentuk orientasi politik suatu masyarakat dan dapat melihat secara jelas pendekatan yang lebih dominan membentuk orientasi politik masyarakat dalam suatu pemilihan langsung.

Masyarakat Pekon Sebarus merupakan masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi dan dikenal sebagai masyarakat perdesaan yang memiliki pengetahuan dan wawasan seperti masyarakat perkotaan. Kenyataan tersebut disebabkan letak Pekon Sebarus yang bersebelahan dengan Kota Liwa sebagai Ibu Kota Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat di sana memiliki pengetahuan dan rasa kepedulian cukup tinggi dengan kehidupan bermasyarakat termasuk juga dalam kehidupan politik. Tingkat partisipasi masyarakat di sana dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik mereka baik dalam proses pemilihan maupun di luar proses pemilihan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama peneliti tinggal di Pekon Sebarus, mayoritas masyarakat aktif dalam berpartisipasi setiap diadakannya pemilihan, baik pemilihan peratin (kepala desa), pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden serta legislatif. Selama pengamatan dari pemilihan-pemilihan tersebut, peneliti melihat aktifnya masyarakat dalam proses pemilihan dan proses sebelum pemilihan. Masyarakat disana selalu mengikuti kegiatan seperti kampanye, diskusi politik, dan juga ikut dalam kelompok kepentingan maupun partai politik. Mereka juga mengikuti dan mengamati proses pendaftaran pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Semua bentuk partisipasi politik tersebut tidak tertutup pada tingkatan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, agama, maupun umur.

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 memasuki pergantian rezim pemerintahan yang baru. Pemilu pada kabupaten ini diselenggarakan pada bulan September 2012 yang diikuti oleh banyak calon dari berbagai partai politik, termasuk calon yang masih memegang jabatan (*incumbent*). Kondisi ini sangat menarik diamati karena adanya persaingan yang ketat antara calon baru dengan calon *incumbent* yang saat ini masih memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat Pekon Sebarus sendiri secara tidak langsung telah terbagi orientasinya karena adanya tokoh daerah setempat yang mencalonkan sebagai pesaing dari calon *incumbent*. Tokoh daerah tersebut seorang pengusaha yang bernama Piterson. Beliau dikenal masyarakat setempat sebagai pesaing yang mampu menggantikan kepemimpinan calon *incumbent* untuk periode selanjutnya.

Orientasi masyarakat Pekon Sebarus tidak akan menutup kemungkinan akan berbeda dengan budaya yang ada sebelumnya. Perubahan orientasi ini dikarenakan adanya tokoh daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Lampung Barat 2012. Orientasi yang terbentuk tidak terbatas pendekatan sosiologis semata. Masyarakat Pekon Sebarus juga kemungkinan akan memakai kalkulasi untung dan rugi dalam memilih suatu calon atau dikenal dengan pendekatan pilihan rasional. Pendekatan yang biasanya tetap digunakan masyarakat pada umumnya, yaitu pendekatan psikologis sosial yang dilihat berdasarkan keterikatan emosional pemilih dengan kandidat atau partai. Masyarakat yang sifatnya majemuk akan menuntut terjadinya perubahan karakteristik pemilih dalam suatu wilayah yang akan diidentifikasi melalui pendekatan ekologis. Terakhir, pendekatan struktural pun tidak luput dari pembentukan orientasi politik masyarakat akibat perbedaan struktur sosial.

Pembentukan orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dapat berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terhadap obyek-obyek politiknya. Nilai tersebut tidak lepas dari tiga komponen mendasar, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Pembentukan suatu orientasi dalam masyarakat tersebut akan lebih jelas jika diidentifikasi berdasarkan pendekatan struktural, sosiologis, psikologis sosial, ekologis, dan pilihan rasional. Peneliti memfokuskan penelitiannya untuk melihat orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam pemilihan Kabupaten Lampung Barat 2012 dari pendekatan struktural, sosiologis, psikologis sosial, ekologis, dan pilihan rasional. Seiring dengan adanya persaingan antar calon yang berkompetisi maka tidak menutup kemungkinan

akan merubah orientasi-orientasi sebelumnya yang telah terbentuk. Orientasi yang telah lama terbentuk tersebut pasti menjadi orientasi yang baru di dalam masyarakat Pekon Sebarus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kondisi Orientasi Politik Masyarakat Pekon Sebarus Dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai ilmu politik khususnya terkait hal orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam pemilukada Kabupaten Lampung Barat 2012.
- 2) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu calon bupati maupun wakil bupati yang sedang berkompetisi maupun calon yang berkompetisi pada masa mendatang,

aparatur pekon maupun tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta masyarakat pada umumnya mengenai kondisi orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus. Selain itu memberikan masukan dan gambaran yang jelas pada pembaca mengenai orientasi politik masyarakat Pekon Sebarus dalam pemilu pada Kabupaten Lampung Barat 2012.